

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada Tahun 2015-2020

Salma Azzahra^{*}, Westi Riani, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*salmaazhr99@gmail.com, westiriani@gmail.com, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Abstract. There are several problems in the process of economic development that are often faced in each country, such as poverty. In the context of poverty reduction, the government currently has various integrated poverty reduction programs ranging from poverty reduction programs based on social assistance, poverty alleviation programs based on community empowerment run by various elements of the government, both central and regional. One of the government's efforts to reduce poverty in villages, the government has determined the delegation of authority from the center to the regions in the form of regional autonomy. This study aims to determine the effect of the Village Fund Allocation (ADD), and the Human Development Index (IPM) on the Poverty Level in 34 Province-Indonesia in 2015-2020. This research data is secondary data, namely data from the Central Statistics Agency with a total sample of 34 provinces in Indonesia. The analytical method used is quantitative. This study uses panel data analysis with the Fixed Effect Model (FEM) approach, which was obtained based on the results of the Chow test and Hausman test. The results showed that simultaneously (f-test) Village Fund Allocation (ADD) and Human Development Index (IPM) had a significant effect with a prob f-statistic of 0.000000. Partially (t-test), shows ADD has a significant negative effect on the Poverty Level per Province in Indonesia with a coefficient of 0.041758, and HDI has a significant negative effect on the poverty rate per Province in Indonesia with a coefficient of -0.035880.

Keywords: *Village Fund Allocation (ADD), Human Development Index (IPM), and Poverty Level.*

Abstrak. Ada beberapa masalah dalam proses pembangunan ekonomi yang sering dihadapi di tiap negara, seperti salah satunya kemiskinan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa, pemerintah telah menetapkan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah berupa otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi-Indonesia pada tahun 2015-2020. Data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal Badan Pusat Statistik dengan jumlah sampel sebanyak 34 Provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang diperoleh berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan (uji-f) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh secara signifikan dengan prob f-statistik 0.000000. Secara parsial (uji-t), menunjukkan ADD berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan per Provinsi di Indonesia dengan koefisien sebesar 0.041758, dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia dengan koefisien sebesar -0.035880.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa (ADD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Kemiskinan.*

A. Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Stephen, 2004). Tujuan dari pembangunan salah satunya yaitu mengatasi kemiskinan yang ada di daerah-daerah. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Salah satu faktor yang menyebabkan keteringgalan dan penghambat dalam pembangunan suatu Negara adalah tingginya angka kemiskinan (Kuncoro, 2006).

Laju penurunan kemiskinan berjalan lambat dan cenderung stagnan selama lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin hanya berkurang dari 28.51 juta jiwa atau sekitar 11.13% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2015 menjadi 24.79 juta jiwa atau sekitar 9.22% pada tahun 2019. Itu artinya dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 3 juta jiwa, dan persentase penurunan tingkat kemiskinan kurang dari 2% (BPS). Berikut merupakan jumlah penduduk miskin di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020

Berdasarkan data kemiskinan diatas, angka penduduk miskin terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan data yang didapat dari BPS, angka kemiskinan penduduk pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin desa pada tahun 2019 mencapai 12.60%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perkotaan yang hanya 6.56%. Persentase penduduk miskin di desa juga di atas angka penduduk miskin nasional yang berada di angka 9.22% pada 2019.

Sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu program untuk menanggulangi masalah kemiskinan yaitu Alokasi Dana Desa. Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Menurut studi sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan Sukanto (2014), Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk kemiskinan di Indonesia, karena menurutnya ADD mempunyai dampak dalam mengentaskan kemiskinan dan perekonomian daerah. Kemudian, ADD juga merupakan bahan masukan penyempurnaan substansi ADD dalam RUU Desa dalam rangka untuk mewujudkan komitmen pemerintah yang selalu *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment* (Azwardi, 2014).

Alokasi Dana Desa sendiri merupakan suatu pengeluaran pemerintah yang dialokasikan ke tingkat pemerintah daerah melalui dana yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa dalam rangka mengentaskan ketimpangan daerah tertinggal dengan harapan agar daerah desa tersebut menjadi maju seperti desa yang sudah maju dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Tingkat kemiskinan yang rendah dapat memperbaiki kinerja perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu Negara dalam mengentaskan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Disisi lain, rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja penduduk, dimana dapat berakibat juga pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, diperlukan investasi manusia yang berkualitas. Hal ini ditujukan agar produktivitas setiap warga bisa meningkat akibat pengetahuan yang dimiliki. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah untuk diatasi, hal tersebut juga berlaku di Indonesia yang masih memiliki banyak penduduk miskin. Walaupun sudah banyak kebijakan yang diterapkan, kemiskinan masih saja menjadi perhatian utama sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan analisis yang tepat.

Untuk menanggulangi tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di setiap Provinsi di Indonesia. Sejumlah variabel ekonomi maupun dalam bentuk ADD dan IPM dipakai untuk mengetahui persoalan kemiskinan sehingga di dapat strategi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang saya ingin mengkaji yang mempengaruhi kemiskinan Provinsi di Indonesia, dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada tahun 2015-2020 ?
 2. Berapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada tahun 2015-2020 ?
- Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.
1. Mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada tahun 2015-2020.
 2. Mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada tahun 2015-2020.
 3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada tahun 2015-2020.
 4. Mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada tahun 2015-2020.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan gambaran yang menjadi observasi dalam suatu penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca menafsirkan penelitian ini. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan serta variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Metode analisis data kuantitatif yaitu dengan membentuk perumusan model yang memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan Provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data yang dikumpulkan yaitu berupa data Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependent serta Alokasi Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel independent. Data yang diperoleh merupakan data dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, pengambilan data langsung dari kantor instansi terkait dan dalam file digital atau data yang diperoleh melalui media elektronik (internet).

Dalam penelitian ini digunakan model regresi data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan data time series. Pemilihan analisis dengan data regresi panel dapat mengatasi masalah kurangnya data dalam penelitian sekunder. Penggunaan metode analisis data panel juga memberikan beberapa kelebihan yaitu mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar hal ini disebabkan oleh gabungan dua data (time series dan cross section).

Dalam pengolahan data panel harus dilakukan beberapa pengujian untuk memilih metode serta model mana yang paling tepat antara metode kuadrat terkecil (pooled least square model), metode tetap (fixed effect model), atau metode acak (random effect model).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai hubungan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan. Uji statistik t pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel-variabel independen X1 (Alokasi Dana Desa) dan X2 (Indeks Pembangunan Manusia) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen Y (Tingkat Kemiskinan).

Tabel 2. Hasil regresi tingkat kemiskinan

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.14602	3.403818	10.91304	0.0000
X1	-0.233678	0.065468	-3.569338	0.0005
X2	-0.368930	0.049632	-7.433306	0.0000

Sumber : Pengolahan data dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil regresi tingkat kemiskinan diperoleh nilai koefisien sebesar -0.233678 dan nilai probabilitas sebesar 0.0005 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05) menjelaskan bahwa setiap Alokasi Dana Desa naik 1 triliun maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.233678%. Dengan demikian ADD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis dugaan peneliti bahwa terdapat pengaruh antara ADD dengan tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia.

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi tingkat kemiskinan diperoleh nilai koefisien sebesar -0.233678 dan nilai probabilitas sebesar 0.0005 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05) menjelaskan bahwa setiap Alokasi Dana Desa naik 1 triliun maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.233678%. Dengan demikian ADD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis dugaan peneliti bahwa terdapat pengaruh antara ADD dengan tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia.

Alokasi dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat menurunkan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses dan pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk maupun karya yang mampu meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat dapat berkembang kemampuannya dan mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat memberikan cara untuk terlepas dari kemiskinan.

Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo - Jusuf Kalla selama empat tahun telah mengalami keberhasilan dalam pembangunan di desa sesuai dengan nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berkembang dan menurunnya jumlah desa tertinggal di Indonesia selama empat tahun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 yang dirilis BPS telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 3.665 desa dari sebanyak 17.626 desa pada 2019 menjadi 13.961 desa pada tahun 2020. Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 1.681 desa dari sebanyak 38.185 pada 2019 menjadi 39.866 desa pada 2020. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri dan desa maju mengalami peningkatan terus di setiap tahunnya.

Hasil ini mengindikasikan bahwa ADD telah sesuai dengan harapan. Dengan adanya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah, yaitu antara lain mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah. Peningkatan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa juga mampu meningkatkan total pengeluaran daerah untuk mendorong peningkatan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah. Selanjutnya peningkatan penyaluran Alokasi Dana Desa juga harus mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan di perdesaan.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Sukanto (2014) menunjukkan bahwa ADD memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh nilai koefisien sebesar -0.368930 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05) menjelaskan bahwa setiap IPM naik 1 skor maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.368930%. Dengan demikian IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Manusia per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Apabila pendapatan seseorang meningkat maka penduduk akan hidup diatas garis kemiskinan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kualitas sumberdaya manusia yang baik ditunjukkan dengan pendidikan yang tinggi dan akan menyebabkan produktivitas juga tinggi. Hal ini yang menyebabkan lingkaran kemiskinan terputus.

IPM adalah variabel yang menjelaskan tentang pembangunan manusia atau kualitas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dimana ketika kualitas SDM meningkat maka produktifitas masyarakat Indonesia akan meningkat pula. Ketika produktifitas masyarakat Indonesia meningkat maka akan mengurangi tingkat kemiskinan dikarenakan masyarakat lebih produktif dalam mencari penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian Fatkhul Cholili (2014) yang membuktikan bahwa IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan

indikasi bahwa peningkatan IPM merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Cholili, 2014).

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, ini selaras dengan menurunnya tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan di Indonesia menurun dari 11.13% pada tahun 2015 menjadi 9.22% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap IPM. Peningkatan IPM juga terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia yang merupakan prestasi luar biasa. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya Provinsi yang memiliki status “sangat tinggi” dan 22 Provinsi berstatus “tinggi” sementara yang memiliki IPM dibawah 70 terdapat 11 Provinsi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2015- 2020.

IPM terdiri dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan hidup layak. IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena salah satu komponen IPM yaitu pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu dilihat dari komponen kesehatan juga dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan etos kerja.

Berdasarkan tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa IPM antar Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta 80.76 indeks. Sedangkan Provinsi dengan IPM terendah adalah Provinsi Papua 60.84 indeks pada tahun 2019. Jika dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa gap antar kedua Provinsi tersebut sangat tinggi. Hal tersebut kemungkinan yang menyebabkan hasil tidak selaras dengan teori.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Papua masih tergolong sangat rendah. Kondisi geografis dan topografi menjadi salah satu kendala penduduk dalam mengakses pendidikan. Hal tersebut diketahui bahwa jarak antara rumah dengan sekolah jauh dan transportasi yang kurang memadai. Data rasio guru dan murid di Provinsi Papua juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio murid dan guru SD sebesar 24.86 yang berarti satu orang guru mendidik sekitar 24-25 murid. Dilihat dari rata-rata lama sekolah di Papua pada tahun 2016 sebesar 6.45 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa lama rata-rata sekolah siswa di Papua masih di bawah target yang diterapkan pemerintah secara nasional yaitu 10.23 tahun. Berdasarkan rata-rata tersebut penduduk Papua berhenti sekolah hanya sampai jenjang SD 6 tahun.

Berdasarkan penjabaran kondisi Provinsi Papua, kemungkinan menjadi salah satu penyebab meski IPM Indonesia naik tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sebab IPM naik hanya beberapa Provinsi yang memiliki indeks diatas rata-rata sementara beberapa Provinsi khususnya yang berada di Indonesia Bagian Timur memiliki indeks dibawah 70 indeks.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode tahun 2015-2020 dengan menggunakan analisis regresi data panel menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020 dengan koefisien sebesar 0.041758. Sehingga ketika ADD meningkat sebesar satu triliun maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.041758%.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan per Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2020 dengan koefisien sebesar -0.035880. Sehingga ketika IPM meningkat sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.035880%.

Acknowledge

Selesainya penyusunan dan penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur, ucapan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama kepada Ibu Westi Riani, S.E., M.E.SY selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Ade Yunita Mafruhah, S.E., M.SOC.SC selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, saran, serta ketersediaan waktunya dalam membimbing penulis sehingga akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, serta pengarahan dan nasehat selama melakukan perkuliahan di Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Astuti, P. B. (2013). Efektivitas Dan Pengaruh Pnpm Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. 5–24.
- [2] Azwardi, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12, 29–41.
- [3] Bappenas. (2004). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. <https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni.pdf>
- [4] Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- [5] Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia. Retrieved from <http://www.bps.go.id>
- [6] Badan Pusat Statistik. (2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Retrieved from <http://www.bps.go.id>
- [7] Cholili, F. M. (2014). Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(5), 557–577.
- [8] Firdaus, M. (2011). Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series. Bogor (ID): PT Penerbit IPB Press.
- [9] Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [10] Gujarati, D. (2006). Basic Econometrics. Jakarta (ID): Erlangga.
- [11] Kementerian Keuangan. (2019). Alokasi Dana Desa. Retrieved from <http://www.kemendagri.go.id>
- [12] Kogoya, F., Partino., & Muhdiarta, U. (2020) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Kembu Kab. Tolikora Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 3.
- [13] Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan; Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta (ID): Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- [14] Napitupulu, Apriliyah S. 2007. “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara”. <http://www.google.com>. Diakses tanggal 5 Oktober 2010.
- [15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 1 (2014).
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014). <https://jdih.kemendagri.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- [17] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 1 (2007). http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri_No._37_Th._2007_Ttg_._Pedoman_Pengelolaan_Keuangan_Desa_.pdf
- [18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (2005). http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._72_Th._2005_Ttg_._Desa_.pdf

- [19] Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AFABETA, cv.
- [20] Sukmaraga, P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- [21] Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526.
- [22] Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- [23] Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan (Kedelapan)*. Erlangga.
- [24] Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I) (9th ed.)*. Erlangga.
- [25] Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- [26] UNDP. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 2004. www.google.com
- [27] Wati, E., & Sadjarto, A. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi*.
- [28] World Bank. 2016. Definisi Kemiskinan.
- [29] World Bank. (2006). Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan. <https://worldbank.org/>
- [30] Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017, Februari). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *JIBEKA*, Vol. 11, No. 2, 27-31.
- [31] Nurhafizah, Mafruhah, Ade Yunita, (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019*, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(2). 109-117.